

TESIS

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
PENGAWASAN KEUANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU**

*The Effect of Financial Statement Presentation, Financial Supervision and
Accounting Information System on the Local Government Financial
Performance of the Taliabu Island District*

SANDRA JEANET MUNTU

A042221006



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
PENGAWASAN KEUANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU**

*The Effect of Financial Statement Presentation, Financial Supervision And
accounting information system on the Local Government Financial
Performance of The Taliabu Island District*

SANDRA JEANET MUNTU

A042221006



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN KEUANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU TALIBU

Disusun dan diajukan oleh

SANDRA JEANET MUNTU
A042221006


Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Dr. Aini Indrijawati, SE.Ak.,M.Si.,CA
NIP 196406091992031003


Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si
NIP 197106192000031001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si
NIP 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM
NIP 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sandra Jeanet Muntu**
NIM : **A042221006**
Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,



Sandra Jeanet Muntu

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridhonya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan jenjang Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, Se.,MSi.,CIPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. H. Aliong Mus, ST Selaku Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan Dr. Salim Ganiru, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Daerah yang memberikan kami ijin, bimbingan dan motivasi untuk menempuh pendidikan jenjang Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si.,WPPE.,WMI.,CRA.,CBOA selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
5. Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA Pembimbing Utama dan dan Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si sebagai tim penasehat yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature serta diskusi- diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;
6. Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE, M.Si, MMktg, C.MP, CMA, dan Prof. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA serta Dr. Sabir, SE.,M.Si sebagai tim penilai yang telah memberikan berbagai saran dan masukan yang konstruktif, demi untuk perbaikan hasil penelitian saya.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terutama Bapak Prof Dr. Arifuddin, SE., Ak.,M.Si.,CA yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
8. Seluruh staf Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
9. Terimakasih kepada ibu, saudara dan sahabat serta orang terkasih karena telah memberikan banyak bantuan, nasehat dan motivasi selama penelitian tesis ini; dan
10. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Saran dan Kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan.

Makassar, Desember 2022

Peneliti

ABSTRAK

SANDRA JEANET MUNTU. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu* (dibimbing oleh Aini Indrijawati dan Mursalim Nohong).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilihat dari fungsi pengawasan kepala organisasi perangkat daerah untuk mengatasi kelemahan pengendalian keuangan daerah, penyajian laporan keuangan, dan optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rancangan penelitian ini digunakan dengan metode asosiatif dan pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 80 orang pegawai ASN. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Kata kunci: penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, sistem informasi akuntansi, kinerja keuangan



ABSTRACT

SANDRA JEANET MUNTU. *The Effect of Financial Statement Presentation, Financial Supervision, and Accounting Information System on the Local Government Financial Performance of Taliabu Island District* (supervised by Aini Indrijawati and Mursalim Nohong)

The financial performance of regional governments in preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) can be seen from the supervisory function of heads of regional apparatus organizations to overcome weaknesses in regional financial control, present financial reports, and optimize the use of accounting information systems that have not run optimally. The aim of this study is to analyze and explain the effect of presentation of financial report, financial supervision, and accounting information system on the local government financial performance. The research design used was associative method and quantitative approach. The samples consisted of 80 ASN employees. The data were obtained by using questionnaires. The method of data analysis used was Multiple Linear Regression Analysis with SPSS application. The results of this study indicate that the presentation of financial statement, financial supervision, and accounting information system has a significant effect on the local government financial performance of the Taliabu Island District.

Keywords: presentation of financial statement, financial supervision, accounting information system and financial performance



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Agency Theory	11
2.1.2 Kinerja Keuangan	12
2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan	16
2.1.4 Pengawasan Keuangan	23
2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi	28

2.2. Tinjauan Empiris	30
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Konseptual	33
3.2 Hipotesis	35
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Rancangan Penelitian	37
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	38
4.3 Populasi dan Sampel	38
4.4 Jenis dan Sumber Data	39
4.5 Teknik Pengumpulan Data	40
4.6 Definisi Operasional Variabel	40
4.7 Instrument Penelitian	42
4.8 Analisis Data	42
BAB V HASIL PENELITIAN	
5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	47
5.2 Karakteristik Responden	50
5.3 Deskripsi Tanggapan Responden	54
5.4 Hasil Analisis Data	63
5.5 Pengujian Hipotesis	64
5.6 Pembahasan	67
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	35
--	----

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 APBD Tahun 2019-2022 Kabupaten Pulau Taliabu	2
--	---

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran	41
--	----

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Pengujian Validitas	47
5.2 Hasil Pengujian Reliabilitas	49
5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	51
5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan.....	52
5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	53
5.7 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja	54
5.8 Tanggapan Responden Tentang Penyajian Laporan Keuangan	55
5.9 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Keuangan.....	57
5.10 Tanggapan Responden Tentang Sistem Informasi Akuntansi	59
5.11 Tanggapan Responden Tentang Kinerja Keuangan.....	61
5.12 Coefficients	63
5.13 Anova	66
5.14 Model Summary	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	83
Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	90
Lampiran 3. Deskripsi Responden	94
Lampiran 4. Distribusi Jawaban Responden	96
Lampiran 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian daerah merupakan hal yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan juga pembangunan di daerah, meminimalisir ketimpangan tiap wilayah, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang ada di setiap daerah (Septariani & Asoka, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa seluruh daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Khusaini dalam Khairudin (2020), Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah serta pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. (Halim & Kusufi, 2018). Sehubungan dengan hal ini, keuangan daerah menjadi

bagian yang sangat perlu untuk diperhitungkan secara matang karena menjadi tonggak dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahun guna memberikan pelayanan dan kesejahteraan maksimal. Pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah dapat dimonitor melalui kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

Penelitian ini membahas mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. Fenomena terkait kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 APBD Tahun 2019-2022 Kabupaten Pulau Taliabu

No.	Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Selisih	Ket.	OPINI BPK
1	2019	662,086,359,721	537,039,012,938	125,047,346,783	Surplus	TMP
2	2020	598,743,450,500	414,426,565,034	184,316,885,466	Surplus	TMP
3	2021	632,048,505,209	613,925,906,064	18,122,599,145	Defisit	WDP
4	2022	684,477,794,890	712,969,866,779	(28,492,071,889)	Defisit	WDP

Sumber: APBD, data di olah 2023.

Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dijalankan dengan baik dan benar maka akan baik juga dalam hal pengendalian keuangannya, baik dalam hal pengendalian pendapatan maupun belanjanya yang dilakukan oleh daerah tersebut. Oleh karenanya, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi untuk diteliti karena akan berdampak bagi pemerintah daerah dan para pengguna lainnya yang memerlukan informasi mengenai hal ini (Insani, 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo dalam Kopong, 2019).

Sehubungan dengan menilai efisiensi atas pelayanan kepada masyarakat, dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk itu, sebagai kabupaten baru yang dimekarkan pada tahun 2013 di Provinsi Maluku Utara yang menjalankan otonomi daerah dan berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Tabel 1.1 Kinerja keuangan yang dilihat dari efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diketahui dari realisasi APBD pada tahun 2020 mengalami kenaikan surplus sebesar 47,40% senilai Rp. 59.269.538.683, dengan tingkat efisiensi 69,22% atau dikatakan efisien. Penilaian Efisien ini dikarenakan tercapai jumlah dari hasil output yang dapat memenuhi target dan sasaran yang ditetapkan. Output yang maksimal adalah hasil dari penggunaan anggaran masyarakat yang efisien. Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2020 memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dimana pada tahun 2019 terdapat kesamaan yaitu BPK memberikan opini TMP. Meskipun tingkat efisiensi 81,11% atau dikatakan cukup efisien.

Pendapat BPK tersebut dijelaskan karena tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2019 dan 2020. Opini TMP diberikan karena ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena kinerja keuangan dalam penyusunan laporan keuangan belum memadai dalam menyajikan laporan keuangan yang masih menyediakan saldo kas pada bendahara pengeluaran, kurangnya pemahaman dalam penggunaan sistem informasi akuntansi, dan peran

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengawas keuangan pada organisasi setiap badan atau dinas yang masih lemah.

Pada tahun 2021 realisasi APBD mengalami defisit hingga 90,17% senilai Rp.166.194.286.321 dengan tingkat efisiensi 97,13% atau dikatakan kurang efisien, dan pada tahun 2022 realisasi APBD masih tetap mengalami defisit sebesar 257,22% senilai Rp.28.492.071.889 dengan tingkat efisiensi 104,16% atau dikatakan tidak efisien. Tidak efisiennya atas pelayanan kepada masyarakat dalam mengukur kinerja keuangan dikarenakan jumlah tidak tercapainya jumlah hasil output yang menjadi target dan sasaran yang ditetapkan. Walaupun BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pendapat WDP pada tahun 2021-2022 merupakan peningkatan pada opini BPK, untuk itu jumlah penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu meningkat. Walaupun masih terdapat point penjelasan terdapat beberapa hal yang material dimana posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 31 Desember 2021 dilihat dari realisasi anggaran, perubahan Saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disajikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini tentunya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik agar lebih ditingkatkan lagi kinerja keuangan sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tingkat efisiensi bisa dikatakan efisien.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan jika pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, karena tanpa adanya

dukungan dana maka kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum dalam rangka merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik. Artinya bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, apabila pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang meningkat juga (Christy dan Adi, 2009 dalam Khairudin, 2020).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan diantaranya yaitu penyajian laporan keuangan. Jika mengacu pada teori agensi, maka pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat sebagai bentuk pengukuran kinerja pemerintah daerah. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti Palembang *et al.* (2022), Elda, dkk. (2020), dan Paramayana dkk. (2022) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selain penyajian laporan keuangan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan secara baik dan benar. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan akan membantu mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintah baik

dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Elda, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh antara pengawasan keuangan dan kinerja keuangan, seperti penelitian yang dilakukan Elda (2020), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money*. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Palembangan *et al.* (2022) yang menemukan hasil bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, Dewi (2023) juga menguji hal yang sama dan memperoleh hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Palembangan *et al.* (2022) yang menguji variabel penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena adanya variabel sistem informasi akuntansi yang ditambahkan dalam menguji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Sistem informasi akuntansi merupakan bidang teknologi informasi yang didukung oleh kemampuan dan penguasaan akuntansi. Adanya sistem informasi akuntansi, maka transmisi informasi keuangan lebih efisien dan lebih cocok untuk pengguna laporan keuangan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur dan mengkomunikasikan kebutuhan suatu instansi, dalam menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Oleh

karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan menginterpretasikan informasi akuntansi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh antara sistem informasi akuntansi dan kinerja keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aprilia, dkk. (2023) serta Adawia dan Ayuazizah (2021). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara sistem informasi akuntansi dengan kinerja keuangan perusahaan.

Dari hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya dinilai kurang maksimal sehingga tidak dapat memperoleh opini WTP oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam pengelolaannya penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya dapat menyajikan laporan keuangan dengan wajar bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pengaplikasian sistem informasi akuntansi diperlukan staf yang menguasai ilmu akuntansi dan dapat menjalankan teknologi informasi yang berpengetahuan luas untuk beradaptasi pada setiap perubahan Sistem Informasi Akuntansi. Pertanggungjawaban juga harus berdasarkan ketepatan waktu, untuk itu diperlukan fungsi pengawasan Kepala OPD agar dapat memenuhi semua persyaratan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Opini WTP.

Dengan adanya fenomena dan hasil observasi, peneliti ingin melihat dan menginvestigasi lebih lanjut serta melakukan pemetaan terkait dengan penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan dan sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting karena pemahaman tersebut merupakan langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu, maka

penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap kinerja keuangan.
2. Menganalisis pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan.
3. Menganalisis sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan.
4. Menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis, praktis dan kebijakan terutama bagi akademisi dan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Selain itu, akademisi juga dapat mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan yang diperoleh dari studi empiris dan menjadi langkah perantara bagi penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan pertimbangan dalam menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu instansi.

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas hanya mengamati pengaruh penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan dan sistem informasi akuntansi terhadap optimalisasi kinerja keuangan daerah pada 40 OPD di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan ke dalam enam bab sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab tinjauan pustaka. Bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga adalah bab kerangka konseptual dan hipotesis. Bab ini berisi kajian teoretis dan empiris yang dirumuskan secara logis dan membentuk kerangka konseptual. Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab keempat adalah bab metode penelitian. Bab ini menguraikan metode dan langkah penelitian secara operasional yang mencakup rancangan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variable, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab kelima adalah bab hasil Penelitian. Bab ini menguraikan tentang teknik yang digunakan dalam menganalisis data dan pembahasan terhadap hasil analisis data yang terdiri dari karakteristik responden, deskripsi tanggapan responden, uji validitas dan reliabilitas, hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab keenam adalah bab Penutup. Bab ini menguraikan tentang Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. *Agency Theory*

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling dalam Insani (2023), merupakan hubungan antara pemegang saham sebagai kepala dan pemimpin bisnis atau manajer sebagai agen. Teori ini beranggapan bahwa terdapat hubungan kerjasama antara dua pihak atas dasar suatu kontrak, yaitu antara pemberi hibah dan orang yang diberi kuasa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Teori keagenan yang terkait dengan penelitian ini adalah bahwa pemerintah yang bertindak sebagai agen (manajemen pemerintah) harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai aktor utama. Prinsipal, dalam hal ini pemerintah, tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari agen-agennya.

Keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki hubungan dengan perataan laba (*income smoothing*), menjelaskan bahwa antara agen dan prinsipal sering memiliki perbedaan kepentingan. (Supriyono, 2018)

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling dalam Hehanussa, 2015). Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan

kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholder*, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat. (Jensen dan Meckling dalam Palembang, 2022).

Dilihat dari sudut pandang teori keagenan tersebut, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberikan wewenang pengaturan kepada *agent* dan memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. (Fahmi, 2020)

2.1.2. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi *outcome*. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk

menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan jika pencapaiannya melebihi dari yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut memiliki kinerja yang sangat baik (Halim dalam Palembang, 2022).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. (Sudaryo dalam Sari, 2021)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (Sumarjo dalam Handayani, 2019)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam

batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. (Ibnu Syamsi dalam Handayani, 2019)

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya (Ibnu Syamsi dalam Palembang, 2022):

a. Kemampuan Struktural Organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

c. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo dalam Kopong, 2019):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim dalam Palembang, 2022):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

3. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi (Mahsun dalam Nurhaedah, 2022):

- a. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

2.1.3. Penyajian Laporan Keuangan

1. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti

pertanggung jawaban dan pengelolaan (Vince & Rheny dalam Pramudita, 2019). Tujuan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa pelaporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan keuangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, menyajikan setiap fakta secara jujur, informasi yang andal dapat dibandingkan serta dipahami seluruh pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas laporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi laporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik dalam memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo dalam Purwaningrum 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkapkan secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan. (Linda, 2018)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari :

a. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit L-O pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari

unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklafikasikan kewajibannya menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan kuasa bendaharawan umum negara atau daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun

yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan atau giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan atas Laporan keuangan (CaLk). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat

dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan daerah yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi atau pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut atau dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana capaian dari setiap program atau kegiatan pemerintah. (Sopyan, 2020)

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sehingga kinerja pemerintah dapat terindifikasi secara jelas dan rakyat pun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut. (Palembangan, 2022)

2. Indikator Penyajian Laporan Keuangan

Terdapat empat Indikator kualitatif laporan keuangan (Bastian dalam Palembang, 2022) yaitu:

1. Relevan

Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dengan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*) Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki unsur berikut:

- a. Dapat diuji kebenarannya (*variable*) Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
- b. Netral tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Penyajian secara wajar. Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat Dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

2.1.4. Pengawasan Keuangan

1. Pengertian Pengawasan Keuangan

Dewi (2023) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. (Halim dalam Yahya, 2023).

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Kuasa et al dan Yanti et al dalam Yahya (2023), yang menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan keuangan daerah juga dianggap penting dalam menjamin keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Beberapa penelitian lainnya, seperti

Akhmad et al, Haza, Kuasa et al dan Yanti et al dalam Yahya (2023) juga menunjukkan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah yang meyakinkan.

2. Manfaat dan Keuntungan Pengawasan

Menurut Harahap dalam Nurpratama (2021), yang mengemukakan apabila sistem pengawasan kerja itu dapat berjalan dengan baik berdasarkan standar pengawasan dan metode yang sesuai maka diperoleh berbagai manfaat atau keuntungan antara lain:

1. Tujuan yang dicapai akan lebih cepat, mudah dan murah.
2. Menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan keterusterangan.
3. Menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga.
4. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab.
5. Memberikan iklim persaingan yang sehat, sehingga karyawan berprestasi.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pengawasan

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Hasibuan dalam Nurpratama (2021) Menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*)
Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*)
Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbility*)
Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.

4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)
Teknik kontrol yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*)
Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.
8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)
Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer, Teknik kontrol harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*)
Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)

Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.

11. Prinsip Kekecualian (*The exception Principle*)

Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)

Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)

Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*)

Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

4. Indikator Pengawasan Keuangan

Menurut Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Tahun 2018 dalam Palembang (2022), indikator dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, antara lain:

1. Ketepatan Waktu

Penetapan Perda APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan APBD dikarenakan adanya:

- a. Keterlambatan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sehingga terlambat diserahkan kepala daerah kepada DPRD.
- b. Kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
- c. DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik.
- d. Tidak adanya akses bagi masyarakat pada proses pembahasan RAPBD karena rapat badan anggaran dan komisi bersifat tertutup.
- e. Terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal.
- f. Keterlambatannya evaluasi oleh pemerintah.

2. Opini BPK Pemerintah Provinsi

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini WTP adalah salah satu dari empat jenis opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini WTP yang dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Masih lemahnya pengelolaan/administrasi asset.
- b. Pengelolaan aset tidak taat asas.
- c. Tindak lanjut hasil temuan tahun sebelumnya tidak tuntas.

3. Realisasi Belanja APBD

Meningkatnya Realisasi Belanja APBD akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Realisasi belanja APBD bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Adapun penyebab tidak terealisasinya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- a. Penetapan perda APBD yang tidak tepat waktu.
- b. Melakukan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan.
- c. Tidak maksimalnya penyerapan dari masing- masing OPD.
- d. Lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh Pemda.

2.1.5. Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan bidang teknologi informasi yang didukung oleh kemampuan dan penguasaan akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi itu sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan suatu bisnis. Sistem informasi tersebut kemudian dialihkan kepada pihak-pihak yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam organisasi. Informasi yang objektif dan berkualitas tinggi akan membantu pengambilan keputusan manajemen, menggunakan semua kekuatan dan peluang yang ada, meringkat kelemahan dan menetralkan hambatan strategis dalam dinamika bisnis (Adawia & Ayuazizah, 2021).

Menurut Azhar Susanto (2018), bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan

keputusan. Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi, transmisi informasi keuangan lebih efisien dan lebih cocok untuk pengguna laporan keuangan. Tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba, maka laporan keuangan memegang peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, elemen dari sistem informasi akuntansi adalah laporan hutang dagang (Adawia & Ayuazizah, 2021).

Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland dalam Kusuma (2021), Sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal. (Kusuma, 2021)

2. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Romney & Steinbart dalam Tarigan (2022), mengatakan sistem informasi akuntansi memiliki tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

3. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart dalam Kusuma (2021), Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.
5. Meningkatkan struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan pengambilan keputusan.

4. Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Menurut DeLone dan McLean dalam Fajar (2020), indikator-indikator dari sistem informasi akuntansi antara lain:

1. Adaptasi (Adaptability).
2. Ketersediaan (Availability).
3. Keandalan Sistem (Reliability).
4. Waktu Respon (Response Time).
5. Kegunaan (Usability).

2.2. Tinjauan Empiris

Palembangan *et al.* (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Paramayana dkk. (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan

kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta.

Elda dkk. (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengawasan keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money* pada pemerintah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: 1) terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money* pada pemerintah Kota Malang, 2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money* pada pemerintah Kota Malang, dan 3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money* pada pemerintah Kota Malang.

Aprilia dkk. (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Dewi (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ridha (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh laporan keuangan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan Pemerintah Aceh. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan: 1) Variabel laporan keuangan basis akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Aceh yaitu sebesar 1,862 atau pada skala likert 2 yang berarti tidak setuju, dan nilai koefisien korelasi (R sebesar 0,857 atau 85,7%. 2) Hasil pengujian statistik memperlihatkan nilai, hasil variabel independen (laporan keuangan basis akrual) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Kinerja instansi pemerintah saat ini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik (Mardiasmo dalam Elda, 2020). Daerah memiliki peran dalam mengelola aset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah. Sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin pada kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal, khususnya untuk kinerja keuangan.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. (Rakadewa, 2022) Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan wilayahnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat dalam batas yang telah ditetapkan oleh peraturan (Dali *et al.*, 2021).

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling dalam Insani (2023), mengemukakan adanya hubungan antara pemegang saham sebagai kepala dan pemimpin bisnis atau manajer sebagai agen. Teori keagenan yang

terkait dengan penelitian ini adalah bahwa pemerintah bertindak sebagai agen (manajemen pemerintah) harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai aktor utama. Prinsipal, dalam hal ini pemerintah, tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari agen-agensya.

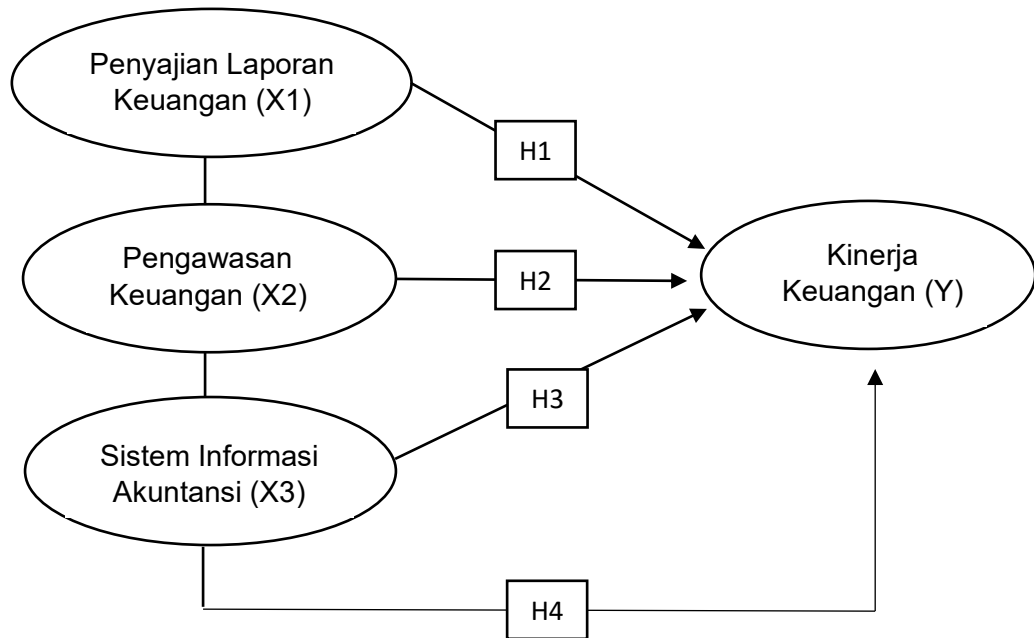
Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. (Fahmi, 2020) Dalam artian bahwa masyarakat dapat mengetahui terjadi peningkatan atau penurunan kinerja dari suatu instansi.

Salah satu faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (Vince & Rheny dalam Pramudita, 2019).

Faktor lain yang juga berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah adalah pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan dalam kinerja pemerintah mencakup segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel sistem informasi akuntansi. Hal ini dilakukan karena sistem informasi akuntansi memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, maka

transmisi informasi keuangan lebih efisien dan lebih cocok untuk pengguna laporan keuangan.

Kerangka konseptual berikut disajikan secara praktis melalui bagan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar 3.1 dapat diketahui bahwa penelitian ini menguji pengaruh variabel penyajian laporan keuangan (X1), pengawasan keuangan (X2), dan sistem informasi akuntansi (X3) terhadap kinerja keuangan (Y).

3.2. Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

H1 : Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H2 : Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

- H3 : Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- H4 : Penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.